

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Polarisasi politik dalam Pilpres 2024 menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan pilpres sebelumnya. Isu-isu agama yang sebelumnya dominan dieksploitasi telah bergeser ke arah perdebatan mengenai 'pro' atau 'kontra' terhadap politik dinasti dan etika politik. Wacana sentral dalam pilpres 2024 adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi, yang memunculkan narasi ketidaknetralan dan intervensi eksekutif dalam pemilu.

Oleh karena itu, penulis ingin menggarisbawahi bahwa diskursus polarisasi politik dalam Pilpres 2024 di Indonesia lebih disebabkan oleh wacana penyalahgunaan kekuasaan eksekutif daripada eksploitasi *formative rifts*, yakni identitas agama. Tindakan intervensi Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai bentuk nepotisme dan manipulasi politik, sehingga memicu polarisasi berbasis konflik *Machiavellian* yang merusak bagi institusi demokrasi, dimana kekuasaan eksekutif digunakan untuk memperkuat dominasi politik tanpa adanya kontrol yang efektif dari lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen.

Namun di sisi lain, perubahan strategi kampanye yang digunakan para aktor politik yang bersaing lebih berfokus pada kebijakan dan citra positif, telah berpengaruh dalam membantu mereduksi polarisasi berbasis identitas agama, serta menciptakan dinamika, wacana, serta diskursus politik yang lebih baik dibandingkan Pilpres sebelumnya yang dianggap telah mengancam tatanan sosial di masyarakat. Dalam pilpres 2024, terdapat bukti kuat dari minimnya ujaran kebencian dan pelabelan antar kubu yang bersaing tidak membentuk pengkubuan yang bersifat ekstrim, atau sering disebut dengan istilah “kami” vs “mereka” yang dicirikan dari antar kubu memandang pihak kubu lawan sebagai ancaman eksistensial. Hal tersebut secara langsung, meminimalisir ketegangan sosial yang ditandai dengan meningkatnya permusuhan di masyarakat.

Muhammad Dandi, 2024

POLARISASI POLITIK DALAM KONTESTASI ELEKTORAL DI INDONESIA: Tren dan Perubahan Selama Pilpres 2024

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pertama, kondisi polarisasi pada pilpres 2024 dapat dikategorikan sebagai polarisasi politik yang merusak dan mengancam terjadi berdasarkan aspek kelembagaan demokrasi, namun tidak menyebabkan dan mengancam tatanan sosial di masyarakat, karena tidak terjadinya pembelahan kubu dan permusuhan yang ekstrim di masyarakat. Kedua, telah terjadi penurunan tren polarisasi politik di Indonesia dalam kontestasi pemilihan presiden yang dianggap menguat pada pilpres sebelumnya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan saran praktis, penulis memiliki beberapa saran dalam konteks praktisi dalam penelitian penulis. Pertama, pemerintah dan institusi terkait harus meningkatkan transparansi dan netralitas dalam proses pemilu yang jujur dan adil, terutama dalam hal indikasi intervensi atau cawe cawe yang dilakukan eksekutif. Karena dalam hal ini, indikasi intervensi dari pihak eksekutif terbukti menyebabkan polarisasi politik disekitar garis pemilih, serta di sisi lain hal tersebut juga mengancam institusi demokrasi. Kedua, perlunya memperkuat lembaga-lembaga pengawas demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan independensi dan efektivitas dalam mengawasi proses pemilu serta menindak pelanggaran dengan tegas.

Ketiga, perlunya memberikan pendidikan dan pemahaman politik yang masif dan mendalam kepada masyarakat, khususnya pemilih muda dan pemilu dari institusi dan stakeholder terkait mengenai pentingnya etika politik dan nilai-nilai demokratis baik di kehidupan maupun media sosial, karena hal tersebut cukup penting untuk pemilih mendatang dalam memahami manipulasi dan konflik kepentingan di dalam kontestasi elektoral. Keempat, mendorong aktor-aktor politik untuk menghindari praktik yang memecah belah berbasis identitas atau isu primordial lainnya. Kelima, mendorong

kepada setiap aktor-aktor politik yang bersaing pada kontestasi elektoral untuk menggunakan kampanye dialogis yang bersifat delibertif, serta tidak menggunakan gagasan populis yang tidak rasional dalam kampanye nya.

5.2.2 Saran Teoritis

Berdasarkan saran teoritis, penulis merekomendasikan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti serta mengeksplorasi tentang polarisasi politik yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dari eksekutif dan seberapa jauh tindakan tersebut dapat menyebabkan polarisasi yang merusak. Selain itu, penulis juga merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk menganalisis secara teoritis dampak dari intervensi eksekutif dalam pemilu terhadap stabilitas demokrasi menggunakan teori-teori yang tersedia untuk memahami bagaimana tindakan-tindakan tersebut mempengaruhi struktur politik dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dengan penerapan teoritis ini, diharapkan polarisasi politik dalam pemilu mendatang dapat dikelola dengan lebih baik, serta tercipta demokrasi yang lebih stabil dan harmonis di Indonesia.